



Penerapan Sertifikasi Laik Fungsi Terhadap Bangunan Publik di Kota Banda Aceh

¹Hafnidar A. Rani, ²Muhammad Hanif

¹Dosen Tetap Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Aceh

²Mahasiswa Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Aceh

¹ hafnidar.ar@unmuha.ac.id, ² hanif.muhammadza@gmail.com

Abstract

Certificate of Occupancy (CO) is a certificate issued by the Regional Government for a building that has been completed and has met the requirements for the proper occupancy of the building, which is also applied to public buildings in Banda Aceh. The problem of this research is whether the building owner/user knows about CO and whether the building owner/user already knows about the implementation of CO in accordance with the law. This study aims to investigate the owner/users knowledge on CO and to determine the owner/users of the building knowledge about the application of CO in accordance with the law. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires to 100 respondents, namely owners/users of public buildings in Banda Aceh. The variables used in this study are architectural components, structural, mechanical, electrical, outdoor layout, and the reliability of buildings to public buildings. The results of the factor analysis show that the correlation between a variable and the factors formed is > 0.5 , so the factors formed have a relationship to summarize the six variables which has been analyzed. The results of the validity test of the r -table value of 0.197 meet the requirements of r -count $> r$ table. The reliability test results qualify with Cronbach's Alpha value greater than 0.6. The results of descriptive analysis show that the frequency of building owners who know about CO is 6% and building users who know about CO is 2%, while the frequency of owners who know about the application of CO in accordance with the law is 2% and users who know about the application of CO are in accordance with the law is 1%. This indicates that there are still many users/owners of public buildings in Banda Aceh who do not know about CO and do not understand about the application of CO in accordance with the law. Therefore, the Banda Aceh Government needs to disseminate information about the implementation of CO, especially to owners of public buildings.

Keywords: Public buildings, building feasibility, CO

Abstrak

Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan, demikian juga kelaikan bangunan publik di Kota Banda Aceh. Permasalahan penelitian ini adalah apakah pemilik/pengguna gedung mengetahui tentang SLF dan apakah pemilik/pengguna gedung sudah mengetahui tentang penerapan SLF sesuai dengan Undang-Undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pemilik/pengguna gedung mengetahui tentang SLF dan untuk mengetahui pemilik/pengguna gedung sudah mengetahui tentang penerapan SLF sesuai dengan Undang-Undang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 responden yaitu pemilik/pengguna bangunan publik di Banda Aceh. Variabel yang digunakan penelitian ini adalah komponen arsitektur, struktural, mekanikal, elektrik, tata ruang luar, dan keandalan bangunan terhadap bangunan publik. Hasil analisis faktor menunjukkan korelasi antara suatu variabel dengan faktor yang terbentuk adalah $> 0,5$ maka faktor yang terbentuk ini mempunyai hubungan untuk merangkum keenam variabel yang dianalisis. Hasil uji validitas nilai r -tabel 0,197 memenuhi syarat r -hitung $> r$ tabel. Hasil uji reliabilitas memenuhi syarat dengan nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa frekuensi responden pemilik bangunan yang mengetahui tentang SLF adalah 6% dan pengguna bangunan yang mengetahui tentang SLF adalah 2%. Sedangkan frekuensi pemilik yang mengetahui tentang penerapan SLF sesuai Undang-Undang adalah 2% dan pengguna yang mengetahui tentang penerapan SLF sesuai dengan Undang-Undang adalah 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna/pemilik bangunan publik di Kota Banda Aceh masih banyak yang belum mengetahui tentang SLF di Kota Banda Aceh dan masih belum memahami tentang penerapan SLF yang sesuai dengan Undang-Undang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Banda Aceh perlu melakukan sosialisasi tentang penerapan SLF, terutama kepada pemilik bangunan publik.

Kata kunci: Bangunan publik, kelaikan bangunan, SLF

<https://doi.org/10.37598/tameh.v10i1.120>

1. Pendahuluan

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dibandingkan dengan kota ataupun kabupaten lainnya Kota Banda Aceh adalah kota yang paling berkembang di Aceh, dapat dilihat dari banyaknya bangunan gedung-gedung baru yang dibangun baik di pusat-pusat kota maupun di bagian pinggiran kota seperti pembangunan hotel, pembangunan pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan bangunan gedung lainnya. Kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat bangunan publik yang merupakan tempat berkegiatan ataupun tempat yang nyaman serta aman bagi pengguna gedung, dan dibuktikan dengan Sertifikasi Laik Fungsi [1].

Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. SLF merupakan bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung yang digagas oleh [2]. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung. Dengan adanya amanat peraturan ini diharapkan bangunan-bangunan publik yang ada menjadi andal dan laik [3].

Berdasarkan [4] dan [5] bahwa bangunan gedung harus memenuhi persyaratan secara administratif dan teknis sehingga gedung layak fungsi. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam [6]. Adapun pemerintah menjalankan serta melaksanakan aturan SLF Bangunan Gedung pada tahun 2010 dan harus diterapkan dan diterapkan paling lambat pada tahun 2020 disemua provinsi baik di kota maupun kabupaten.

Pemerintah Aceh terus mendorong kabupaten dan kota di Aceh untuk segera menerbitkan SLF bagi bangunan publik. Ini untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah

dan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan. Serta akan merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis dan memfasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan.

Permasalahan penelitian ini adalah apakah pemilik/pengguna gedung mengetahui tentang SLF dan apakah pemilik/pengguna gedung sudah mengetahui tentang penerapan SLF sesuai dengan Undang-Undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pemilik/pengguna gedung mengetahui tentang penerapan SLF dan untuk mengetahui pemilik/pengguna gedung sudah mengetahui tentang penerapan SLF sesuai dengan Undang-Undang.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konstruksi Gedung

Menurut [7], konstruksi gedung adalah bangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum, misalnya bangunan institusional, pendidikan, industri ringan seperti gudang, bangunan komersial, sosial dan tempat rekreasi. Jenis bangunan pada konstruksi ini, misalnya gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen/rumah susun, dan sekolah. Konstruksi gedung biasanya direncanakan oleh arsitek dan insinyur sipil, sementara material yang dibutuhkan lebih ditekankan pada aspek-aspek arsitektural.

2.2 Bangunan Publik

Bangunan publik adalah bangunan yang diperuntukan untuk masyarakat umum yang identik dengan pusat pelayanan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, perekonomian, keamanan ataupun kebutuhan kebutuhan yang lain [4].

Pengertian bangunan dalam arti [5] adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Tabel 1. Fungsi Bangunan Gedung [4]

Fungsi Hunian	Bangunan untuk rumah tinggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sederhana.
Fungsi Keagamaan	Masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.
Fungsi Usaha	Bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
Fungsi Sosial dan Budaya	Bangunan gedung pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
Fungsi Khusus	Bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

Selain itu dijelaskan juga dalam [4], bahwa setiap bangunan gedung memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Hal ini dirumuskan dalam Bab III Pasal 5 yang mengidentifikasi fungsi bangunan gedung seperti yang dipaparkan pada Tabel 1 di atas.

2.3 Laik Fungsi Bangunan Gedung

Menurut [8], kelaikan bangunan adalah suatu ukuran dimana bangunan tersebut dapat digunakan secara aman dan nyaman atau tidak. Kelaikan bangunan sangat mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan. Jadi bisa dikatakan kelaikan adalah keadaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan atau yang harus ada.

Menurut [9], kelaikan bangunan adalah keadaan bangunan yang harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam hal ini ditentukan oleh pemerintah. Kelaikan bangunan adalah suatu ukuran dimana bangunan tersebut dapat digunakan secara aman dan nyaman atau tidak. Kelaikan bangunan sangat mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan. Menurut [5] dijelaskan bangunan haruslah laik fungsi. Laik fungsi gedung adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.

Bangunan gedung yang dinyatakan laik fungsi adalah bangunan yang telah dilakukan pengkajian teknis terhadap pemenuhan seluruh persyaratan teknis bangunan gedung, dan pemerintah daerah yang mengesahkan dalam bentuk SLF. Sedangkan bangunan yang tidak laik fungsi masih diberi kesempatan untuk memperbaiki sampai bangunan dinyatakan laik fungsi. Jika pemilik tidak mampu memperbaiki maka dilakukan tindakan penanggulangan. Untuk rumah tinggal apabila tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki serta membahayakan keselamatan penghuni atau lingkungan maka bangunan tersebut harus dikosongkan, apabila bangunan tersebut membahayakan kepentingan umum, pelaksanaan pembongkarannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Mengacu pada [10], arsitektural bangunan gedung (penutup atap, dinding luar, pintu dan jendela, talang, list plank, dinding dalam, langit-langit, lantai), struktural bangunan gedung (kerangka atap, tangga, kolom, balok, plat lantai, pondasi), mekanikal bangunan gedung (saluran air bersih, sanitasi air, pipa air, unit penghantar udara, *chiller*, panel kontrol/power, pompa air (sumur), sistem transportasi vertikal, sistem proteksi kebakaran, pencegahan kebakaran), elektrikal bangunan gedung (*power supply*), sistem distribusi, beban listrik, sistem elektronika dan tata ruang luar bangunan gedung (saluran air kotor, septik tank/ipal, ruang tanam hijau, jalan lingkungan, tempat parkir, dinding penahan tanah, pagar, penerangan luar).

2.4 Laik Fungsi Bangunan Gedung

Menurut [11], pekerjaan pemeliharaan meliputi jenis pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan penggantian bahan atau perlengkapan bangunan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung. Berikut adalah lingkup pemeliharaan bangunan gedung, yaitu:

2.4.1 Arsitektural

Memelihara secara baik dan teratur jalan keluar sebagai sarana penyelamat (*egress*) bagi pemilik dan pengguna bangunan; memelihara secara baik dan teratur unsur-

unsur tampak luar bangunan sehingga tetap rapi dan bersih; memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur dalam ruang serta perlengkapannya; menyediakan sistem dan sarana pemeliharaan yang memadai dan berfungsi baik, berupa perlengkapan atau peralatan tetap dan atau alat bantu kerja (*tools*); serta melakukan pemeliharaan ornamen arsitektural dan dekorasi yang benar oleh petugas dengan keahlian dan atau kompetensi di bidangnya [11].

2.4.2 Struktural

Memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur struktur bangunan gedung dari pengaruh korosi, cuaca, kelembaban, dan pembebanan di luar batas kemampuan struktur, serta pencemaran lainnya; memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur pelindung struktur; melakukan pemeriksaan berkala sebagai bagian perawatan preventif; mencegah perubahan dan atau penambahan fungsi kegiatan yang menyebabkan peningkatan beban yang bekerja pada bangunan gedung di luar batas beban yang direncanakan; melakukan pemeliharaan dan perbaikan struktur yang benar oleh petugas dengan keahlian dan atau kompetensi di bidangnya; serta memelihara bangunan agar difungsikan sesuai dengan penggunaan yang telah direncanakan [11].

2.4.3 Mekanikal

Memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem tata udara agar mutu udara dalam ruangan tetap memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan yang disyaratkan meliputi pemeliharaan peralatan utama dan saluran udara; memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem distribusi air yang meliputi penyediaan air bersih, sistem instalasi air kotor, sistem hidran, *sprinkler* (alat penyemprot air), septik tank, serta unit pengolah limbah; serta memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem transportasi dalam gedung, baik berupa lift, eskalator, travelator, tangga, dan peralatan transportasi vertikal lainnya [11].

2.4.4 Elektrikal

Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara perlengkapan pembangkit daya

listrik cadangan; melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara perlengkapan penangkal petir; melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara sistem instalasi listrik, baik untuk pasokan daya listrik maupun penerangan ruangan; melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara jaringan instalasi tata suara dan komunikasi (telepon) serta data; serta melakukan pemeriksaan periodik serta memelihara jaringan sistem tanda bahaya dan alarm [11].

2.4.5 Tata Ruang Luar

Memelihara dengan baik dan teratur kondisi serta permukaan tanah dan atau halaman luar bangunan Gedung; memelihara dengan baik dan teratur unsur-unsur pertamanan di luar dan di dalam bangunan gedung, seperti vegetasi (*landscape*), bidang perkerasan (*hardscape*), perlengkapan ruang luar (*landscape furniture*), saluran pembuangan, pagar dan pintu gerbang, lampu penerangan luar, serta pos atau gardu jaga; menjaga kebersihan di luar bangunan gedung pekarangan dan lingkungannya; serta melakukan pemeliharaan taman yang benar oleh petugas dengan keahlian dan atau kompetensi di bidangnya [11].

2.5 Persyaratan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung

Menurut [9], Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang diberikan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus, kepada pemilik/pengguna bangunan gedung meliputi hal berikut ini.

- a. Penerbitan SLF untuk pertama kali.
- b. Perpanjangan SLF selanjutnya.

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi untuk mengajukan SLF gedung adalah:

- a. Bangunan telah selesai dibangun.
- b. Diberikan untuk bangunan yang merupakan satu kesatuan system.
- c. Dapat diberikan secara keseluruhan atau Sebagian.
- d. Pemenuhan persyaratan administratif (IMB, status kepemilikan tanah).

- e. Pemenuhan persyaratan teknis (pengujian dan pengamatan di lapangan).
- f. Bangunan harus sesuai IMB (kesesuaian data aktual).
- g. Bangunan harus memenuhi syarat dari segi keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

Adapun prinsip-prinsip untuk pemberian SLF gedung adalah:

- a. Pelayanan prima yaitu proses pemeriksaan laik fungsi, persetujuan, penerbitan SLF, dan perpanjangan SLF bangunan gedung dilaksanakan dengan waktu yang singkat sesuai dengan kompleksitas teknik bangunan Gedung.
- b. Tanpa Pungutan biaya yaitu SLF bangunan gedung sebagai keterangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan bangunan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam IMB untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, sehingga tidak dikenakan biaya.

Bangunan yang telah sesuai dengan prinsip SLF, maka dapat melakukan pengajuan atau permohonan untuk mendapatkan SLF bangunan [9].

3. Metode Penelitian

3.1 Tahapan Persiapan

Dalam tahap persiapan ini disusun hal-hal penting yang harus segera dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan. Dalam tahap persiapan ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Menentukan kebutuhan data.
- b. Studi pustaka terhadap landasan teori yang berkaitan dengan penanganan permasalahan untuk menentukan garis besarnya.
- c. Menentukan variabel penelitian.
- d. Membagikan kuesioner kepada responden.
- e. Survei lokasi untuk mendapatkan gambaran umum kondisi wilayah studi. Sehingga dari tahap persiapan ini dapat diketahui langkah-langkah penyelesaian

<https://doi.org/10.37598/tameh.v10i1.120>

secara berurutan dan teratur agar didapatkan hasil yang optimal.

- f. Pengolahan dan analisis data.

3.2 Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah komponen arsitektur, struktural, mekanikal, elektrikal, tata ruang luar dan keandalan bangunan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Setelah melaksanakan tahap persiapan maka dilanjutkan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan SLF terhadap bangunan publik di Kota Banda Aceh. Cara mendapatkan data yang digunakan untuk penelitian dibedakan menjadi dua. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jawaban kuesioner yang ditujukan kepada pemilik dan pengguna bangunan publik di Kota Banda Aceh. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah peta provinsi Aceh, peta Kota Banda Aceh, jumlah dan nama bangunan publik di Kota Banda Aceh.

3.4 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang diambil yaitu masyarakat Kota Banda Aceh, khususnya pemilik dan pengguna bangunan publik milik pemerintah dan milik swasta. Data jumlah penduduk Kota Banda Aceh diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh seperti pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh

No. Kecamatan	Jumlah Penduduk
1. Meuraxa	20.561
2. Jaya Baru	26.525
3. Banda Raya	24.878
4. Baiturrahman	38.192
5. Lueng Bata	26.633
6. Kuta Alam	53.679
7. Kuta Raja	13.900
8. Syiah Kuala	38.682
9. Ulee Kareng	27.271
Total	270.321

Secara umum, jumlah sampel dalam analisis faktor minimal 50 responden, bahkan seharusnya ukuran sampel sebanyak 100 atau lebih besar. Maka dikarenakan populasi yang besar yaitu lebih dari 100, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 responden pada bangunan publik yang tertera pada Tabel 3 di atas, dengan menggunakan teknik sampling kuota.

Tabel 3. Sampel Penelitian Bangunan Publik di Kota Banda Aceh

No.	Sampel Penelitian Bangunan Publik	Bertingkat Memiliki SLF	Pemilik Bangunan
1	RS. Prince Nayef Syiah Kuala	2	√ Swasta
2	Suzuya Mall	4	- Swasta
3	RS. Harapan Bunda	4	√ Swasta
4	SMA Negeri 8	3	- Pemerintah
5	RSUD. Zainoel Abidin	2	- Pemerintah
6	FKIP Kimia Universitas SyiahKuala	2	- Pemerintah

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Uji Validitas

Hasil uji validitas dalam penelitian ini menunjukkan nilai r hitung dari komponen arsitektur, struktural, mekanikal, elektrikal, tata ruang luar dan keandalan bangunan lebih besar dari r tabel (0,197) dengan signifikansi (5%) dengan hasil jawaban kuesioner yang diberikan kepada 100 responden, oleh karena itu variabel penelitian telah memenuhi syarat atau semua variabel pernyataan ini valid.

4.2 Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* terhadap komponen arsitektur (0,933), komponen struktural (0,919), komponen mekanikal (0,855), komponen elektrikal (0,820), komponen tata ruang luar (0,937) dan keandalan bangunan (0,909) lebih besar dari *Cronbach Alpha* 0,6, oleh karena itu semua variabel pernyataan ini reliabel.

4.3 Analisis Faktor

4.3.1 Uji Normalitas

<https://doi.org/10.37598/tameh.v10i1.120>

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui keenam variabel faktor ini terdistribusi normal atau tidak. Dasar keputusan uji normalitas jika nilai sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika nilai sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Pengujian Normalitas Menggunakan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,00000
	Std. Deviation	,271741
Most Extreme Differences	Absolute	,047
	Positive	,043
	Negative	-,047
Kolmogorov-Smirnov Z		,469
Asymp. Sig. (2-tailed)		,981

Berdasarkan Tabel 4 di atas maka hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* diketahui nilai signifikansi 0,981 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dan pengujian dapat dilanjutkan.

4.3.2 Uji Kaiser Meyer Olkin (KMO) dan Barlett's Test of Sphericity

Uji *Kaiser Meyer Olkin* (KMO) dilakukan untuk mengetahui kecukupan sampel atau pengukuran kelayakan sampel. Analisa faktor dianggap layak jika besaran KMO > 0,5 dan *Barlett's Test of Sphericity* dipakai untuk menguji bahwa variabel-variabel dalam sampel berkorelasi. Hasil pengujian KMO dan *Barlett's Test* dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Pengujian KMO dan *Barlett's Test*

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy		.841
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-square	615.376
	Df	15
	Sig.	.000

Berdasarkan Tabel 5 di atas, indeks ini digunakan untuk meneliti ketepatan penggunaan analisa faktor. Apabila nilai KMO antara 0,5 sampai 1 dan signifikansi *Bartlett's Test of Sphericity* ini kurang dari level

signifikansi (α) yang ditetapkan, maka analisis faktor tepat digunakan.

Berdasarkan hasil dari output diperoleh nilai KMO sebesar 0,841 dan nilai signifikansi *Bartlett's Test of Sphericity* adalah 0,000, maka analisis faktor tepat digunakan untuk menyederhanakan kumpulan 6 variabel tersebut, sehingga proses analisis faktor dapat dilanjutkan.

4.3.3 Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA) dan Pembentukan Faktor

Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA) digunakan untuk mengukur derajat korelasi antar variabel dengan kriteria $MSA > 0,5$. Proses selanjutnya melihat *table Anti-image Matrix* untuk menentukan variabel mana saja yang layak digunakan dalam analisis lanjutan.

Diketahui nilai MSA untuk masing-masing variabel adalah: 0,846 (X1), 0,896 (X2), 0,797 (X3), 0,926 (X4), 0,790 (X5), 0,806 (Y), seperti yang terlihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Pengujian *Measures of Sampling Adequacy* (MSA)

		X1	X2	X3	X4	X5	Y
Anti-image Covariance	X1	.209	-.110	-.019	-.030	-.093	.034
	X2	-.110	.208	-.046	-.016	.000	-.024
	X3	-.019	-.046	.188	-.087	.078	-.104
	X4	-.030	-.016	-.087	.261	-.057	-.002
	X5	-.093	.000	.078	-.057	.215	-.107
	Y	.034	-.024	-.104	-.002	-.107	.162
Anti-image	X1	.846 ^a	-.526	-.096	-.130	-.436	.188
	X2	-.526	.896 ^a	-.230	-.067	-.002	-.129
	X3	-.096	-.230	.797 ^a	-.391	.390	-.594
	X4	-.130	-.067	-.391	.926 ^a	-.241	-.011
	X5	-.436	-.002	.390	-.241	.790 ^a	-.574
	Y	.188	-.129	-.594	-.011	-.574	.806 ^a

Berdasarkan Tabel 6 di atas, bahwa tidak terdapat variabel yang dihapus karena seluruh nilai variabel berada diatas 0,7. Setelah variabel ditentukan dan dipilih serta perhitungan korelasinya telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis.

4.3.4 Komunalitas

Komunalitas pada dasarnya adalah metode yang digunakan dalam pembentukan faktor adalah metode analisis *principal component*. Tabel Komunalitas di bawah ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk

menjelaskan faktor atau tidak. Hasil pengujian komunalitas dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Hasil Pengujian Komunalitas dengan Metode *Principal Component*

	Initial	Extraction
X1	1.000	.797
X2	1.000	.830
X3	1.000	.780
X4	1.000	.806
X5	1.000	.760
Y	1.000	.836

Berdasarkan Tabel 7 di atas diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai *extraction* diatas 0,5 dan memiliki nilai terdekat antar masing-masing variabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dapat dikatakan memenuhi syarat menjadi sebuah komunalitas dan dapat dijadikan dalam satu kelompok.

4.3.5 Penentuan Jumlah faktor dan Scree Plot

Setelah didapatkan jumlah faktor yang akan dibentuk, selanjutnya ditentukan dengan melakukan kombinasi beberapa kriteria untuk mendapatkan jumlah faktor yang paling sesuai dengan data penelitian.

Total *variance explained* menunjukkan nilai masing-masing variabel dianalisis, kriteria pertama yang digunakan adalah nilai *eigen*. Faktor yang mempunyai nilai *eigen* lebih dari 1 akan dipertahankan dan faktor yang mempunyai nilai *eigen* kurang dari 1 tidak akan diikutsertakan dalam model. Dengan kriteria ini diperoleh jumlah faktor yang digunakan adalah 1 faktor.

Hasil pengujian *Principal Component Analysis* dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8 Total *Variance Explained* dengan Metode Analisis *Principal Component*

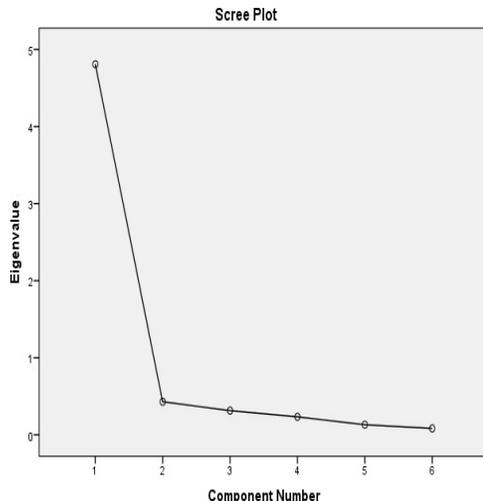
Component	Initial Eigen values			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.808	80.137	80.137	4.808	80.137	80.137
2	.429	7.148	87.284			
3	.314	5.241	92.525			
4	.233	3.890	96.415			
5	.132	2.193	98.608			
6	.084	1.392	100.000			

Kriteria kedua adalah penentuan berdasarkan nilai persentase variansi total yang dapat

dijelaskan oleh banyaknya faktor yang akan dibentuk. Dari Tabel 8 di atas dapat dilakukan interpretasi yang berkaitan dengan variansi total kumulatif sampel. Jika keenam variabel diekstraksi menjadi 1 faktor, diperoleh variansi total yang dapat dijelaskan adalah 80,137%.

Kriteria ketiga adalah penentuan berdasarkan *scree plot*, yaitu suatu plot nilai eigen terhadap jumlah faktor yang diekstraksi. Titik pada tempat dimana *scree* mulai terjadi menunjukkan banyaknya faktor yang tepat. Titik ini terjadi ketika *scree* mulai terlihat mendatar diketahui bahwa *scree plot* mulai mendatar pada ekstraksi variabel-variabel awal menjadi 1 faktor.

Gambar 1 di bawah ini menjelaskan hubungan antara banyaknya faktor yang terbentuk dengan nilai *eigen value* dalam bentuk grafik. Garis vertikal menunjukkan nilai *eigen*, sedangkan garis horizontal menunjukkan banyaknya indikator dengan melihat nilai titik *component* yang memiliki nilai *eigen value* lebih besar dari 1. Hasil nilai *scree plot* dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Hasil Nilai *Scree Plot*

Berdasarkan dari kombinasi ketiga kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstraksi faktor yang paling tepat adalah 1 faktor.

4.3.6 Komponen Matrik

Setelah diketahui bahwa satu faktor adalah jumlah yang paling optimal, maka tabel komponen matriks menunjukkan distribusi keenam variabel tersebut pada satu faktor <https://doi.org/10.37598/tameh.v10i1.120>

yang terbentuk sedangkan angka-angka yang ada pada tabel tersebut adalah *factor loadings*, yang menunjukkan besar korelasi antara suatu variabel. Hasil pengujian komponen matrik dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Hasil Pengujian Komponen Matrik

Variable	Initial	Extraction
X1	1.000	.797
X2	1.000	.830
X3	1.000	.780
X4	1.000	.806
X5	1.000	.760
Y	1.000	.836

Berdasarkan Tabel 9 di atas, tabel komponen matrik menunjukkan bahwa pada komponen nilai korelasi adalah $> 0,5$ maka faktor yang terbentuk ini dapat merangkum keenam variabel yang dianalisis.

Langkah selanjutnya adalah penentuan signifikansi nilai *factor loading* untuk menentukan pengelompokan variabel ke dalam faktor yang sesuai. Menurut para ahli dalam bidang multivariat, nilai *factor loading* sebesar 0,5 telah dianggap signifikan untuk ukuran sampel 100 responden pada level signifikansi $\alpha > 0,5$. Berdasarkan hal tersebut, dalam interpretasi seluruh *factor loading* akan dianggap signifikan jika nilainya 0,5 atau lebih.

Komponen matrik menunjukkan nilai korelasi antara suatu variabel dengan faktor yang terbentuk. Berdasarkan hasil komponen matrik didapatkan bahwa variabel Y memiliki nilai *loading factors* paling besar yaitu sebesar 0,914.

Korelasi antara keadaan bangunan terhadap komponen arsitektur sebesar 0,983, korelasi keandalan bangunan terhadap komponen struktural sebesar 0,911, korelasi keandalan bangunan terhadap komponen mekanikal sebesar 0,883, dan korelasi keandalan bangunan terhadap tata ruang luar sebesar 0,989.

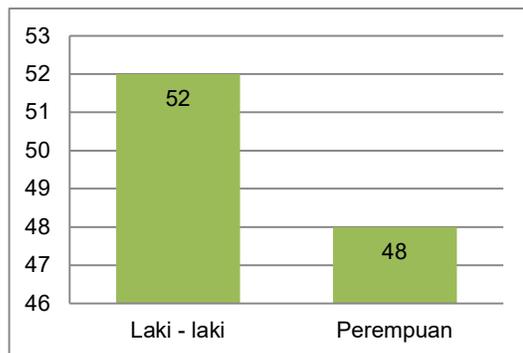
Hasil analisis faktor menunjukkan korelasi antara suatu variabel dengan variabel lainnya yang terbentuk berdasarkan hasil komponen matrik memiliki nilai *loading factors* paling besar yaitu sebesar 0,914 $> 0,5$, menunjukkan bahwa nilai korelasi yang terbentuk

mempunyai hubungan untuk merangkum keenam variabel yang dianalisis.

4.4 Analisis Deskriptif

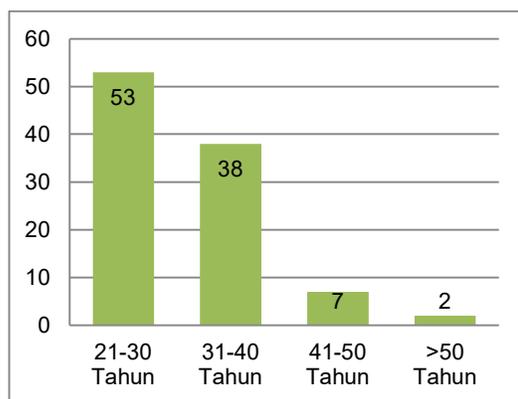
4.4.1 Karakteristik Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yaitu para pengguna/pemilik bangunan publik di Kota Banda Aceh. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Frekuensi Jenis Kelamin Responden

Dari Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 52 responden atau 52% dari total responden, dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 48 responden atau 48% dari total responden. Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.

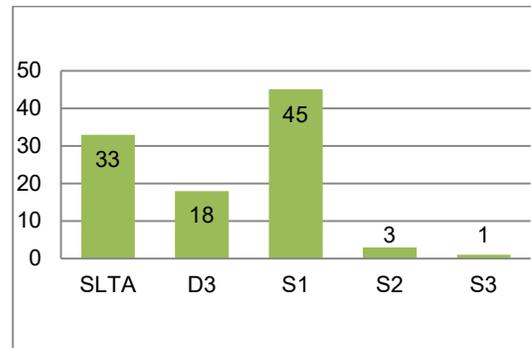


Gambar 3. Frekuensi Umur Responden

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa responden yang berumur 21-30 tahun berjumlah 53 responden (53%), yang berumur 31-40 tahun berjumlah 38 responden (38%), <https://doi.org/10.37598/tameh.v10i1.120>

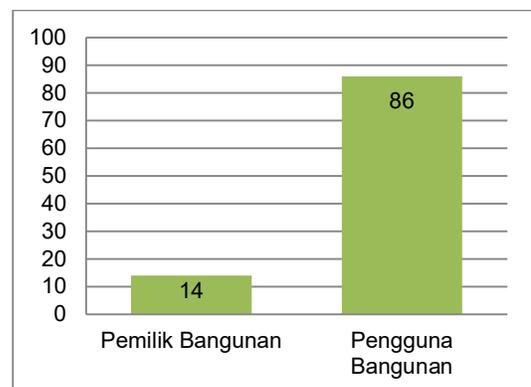
yang berumur 41-50 tahun berjumlah 7 responden (7%), sedangkan yang berumur >50 tahun berjumlah 2 responden (2%). Berdasarkan output di atas diketahui bahwa frekuensi umur dari 100 responden terbanyak adalah umur 21-30 tahun sebesar 53%.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.



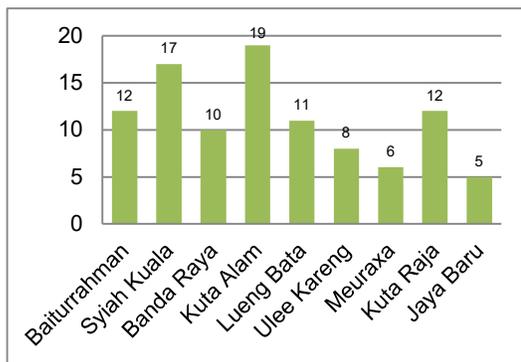
Gambar 4. Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden

Gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir SLTA berjumlah 33 responden (33%), yang memiliki pendidikan terakhir D3 berjumlah 18 responden (18%), yang memiliki pendidikan terakhir S1 berjumlah 45 responden (45%), yang memiliki pendidikan terakhir S2 berjumlah 3 responden (3%), sedangkan yang memiliki pendidikan terakhir S3 hanya 1 orang (1%). Berdasarkan output di atas diketahui bahwa responden terbanyak adalah yang berpendidikan S1 sebanyak 45%.



Gambar 5. Frekuensi Status Responden

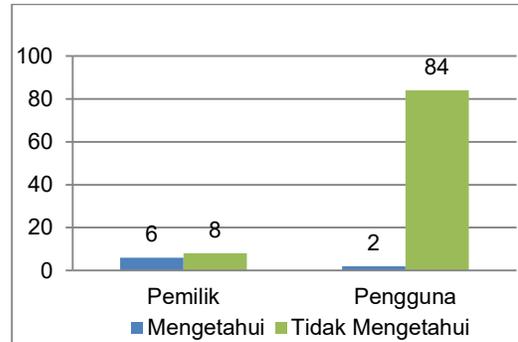
Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa responden sebagai pemilik bangunan berjumlah 14 responden (14%), dan sebagai pengguna bangunan berjumlah 86 responden (86%) dari total responden. Berdasarkan output di atas, maka responden terbanyak adalah pengguna bangunan sebanyak 86%.



Gambar 6. Frekuensi Alamat Responden

Gambar 6 di atas menunjukkan bahwa responden yang beralamat di Kecamatan Baiturrahman berjumlah 12 responden (12%), yang beralamat di Kecamatan Syiah Kuala berjumlah 17 responden (17%), responden yang beralamat di Kecamatan Banda Raya berjumlah 10 responden (10%), yang beralamat di Kecamatan Kuta Alam berjumlah 19 responden (19%), yang beralamat di Kecamatan Lueng Bata berjumlah 11 responden (11%), yang beralamat di Kecamatan Ulee Kareng berjumlah 8 responden (8%), yang beralamat di Kecamatan Meuraxa berjumlah 6 responden (6%), yang beralamat di Kecamatan Kuta Raja berjumlah 12 responden (12%), dan yang beralamat di Kecamatan Jaya Baru berjumlah 5 responden (5%). Berdasarkan output di atas diketahui bahwa responden terbanyak adalah yang beralamat di Kecamatan Kuta Alam yaitu sebanyak 19%.

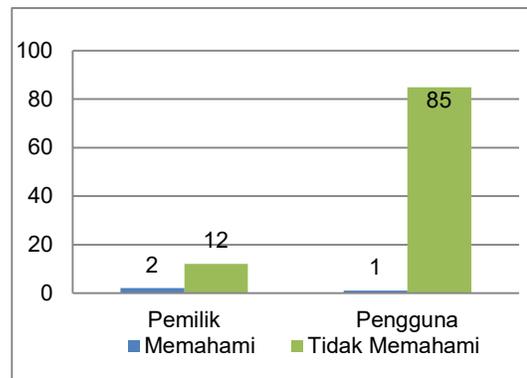
Gambar 7 di bawah ini menunjukkan bahwa pemilik bangunan yang mengetahui tentang SLF berjumlah 6 responden (6%), dan yang tidak mengetahui sejumlah 8 responden (8%). Sedangkan pengguna bangunan yang mengetahui tentang SLF hanya 2 responden (2%), dan yang tidak mengetahui berjumlah 84 responden (84%).



Gambar 7. Frekuensi Responden Mengetahui Studi Laik Fungsi (SLF)

Berdasarkan output di atas, maka rata-rata responden tidak mengetahui tentang SLF.

Gambar 8 berikut ini memperlihatkan karakteristik responden berdasarkan pemahaman Undang-Undang RI tentang SLF.



Gambar 8. Frekuensi Responden Memahami Undang-Undang RI tentang SLF

Gambar 8 di atas menunjukkan bahwa pemilik bangunan yang memahami Undang-Undang RI tentang SLF berjumlah 2 responden (2%), dan yang tidak memahami sejumlah 12 responden (12%). Sedangkan pengguna bangunan yang memahami Undang-Undang RI tentang SLF hanya 1 responden (1%), dan yang tidak memahami Undang-Undang RI tentang SLF berjumlah 12 responden (12%). Berdasarkan output di atas, maka rata-rata responden tidak memahami Undang-Undang RI tentang SLF.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pengguna/pemilik bangunan publik di Kota

Banda Aceh masih banyak yang belum mengetahui tentang SLF di Kota Banda Aceh dan masih belum memahami tentang penerapan SLF yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2002. Oleh karena itu Pemerintah Kota Banda Aceh perlu melakukan sosialisasi tentang penerapan SLF, terutama kepada pemilik bangunan publik

Daftar Pustaka

- [1] Eticon, 2020. <https://eticon.co.id/mengenal-slf-dan-manfaatnya/> [Available on February 21, 2020].
- [2] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019. *Syarat-syarat dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*, Banda Aceh.
- [3] Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2019. *Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung*, Banda Aceh.
- [4] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002. *Tentang Bangunan Gedung*, Jakarta.
- [5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005. *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*, Jakarta.
- [5] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2018. *Tentang SLF Bangunan Gedung*, Jakarta.
- [7] Irika. W. & Lenggogeni, 2013. *Manajemen Konstruksi*. PT Remaja Rosdakarya:Bandung.
- [8] Yufiansyah, 2016. Analisis Laik Fungsi Bangunan Hunian Vertikal (Studi Kasus: Gedung Rusunawa Kabupaten Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Teknik Sipil*, 22 (20), 516-525.
- [9] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2007. *Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung*, Jakarta.
- [10] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006. *Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung*, Jakarta.
- [11] Mulyandari, H. & Saputra, R. D., 2010. *Pemeliharaan Bangunan - Basic Skill Facility Management*. Andi: Yogyakarta.